



@ Berita Semarang Semarang Raya

Marak Gunakan SKTM Palsu

PPDB Online SMA/SMK Banyak Dikeluhkan

15 Juni 2017

346



tweet

Terkini

Hukum Menikah di Bulan Ramadan

18 Juni 2017

Bagi Rezeki di Bulan Ramadan

18 Juni 2017

Lailatul Qadar dan Tanggungjawab Kebangsaan

18 Juni 2017

260 Bus Siap Berangkatkan 15.000 Pedagang Jamu

18 Juni 2017

Disukai karena Unik dan Banyak Aliran

18 Juni 2017

Berani Bersaing di Dunia Kerja

18 Juni 2017

Luangkan Waktu untuk Jalan-jalan

18 Juni 2017

CEK DATA CENTER: Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo mengecek data center PPDB Online SMA/SMK di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng. (FOTO: AJIE MH/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Laporan penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) palsu untuk menambah 3 poin nilai pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK negeri mulai marak. Orang tua yang berada, membuat SKTM untuk mendongkrak nilai anak mereka agar bisa masuk ke sekolah favorit yang diinginkan.

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, membeberkan, laporan tersebut muncul lewat keluhan yang diutarakan lewat SMS, *Twitter*, dan telepon dari masyarakat. "Banyak laporannya. Tadi ada yang dari Sukoharjo. Tapi sudah dicabut karena di-*bully* teman-temannya," ucapnya setelah mengecek Data Center PPDB *Online* SMA/SMK di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng, Rabu (14/6).

Sejumlah *netizen* juga *ngudo roso* lewat *Instagram* dan *Twitter* yang ditautkan ke akun *@ganjarpranowo*. Mereka mengeluh mengenai pengguna SKTM yang dinilai terlalu diprioritaskan. Bahkan pemilik nilai tinggi terpaksa dibuang karena harus menampung calon siswa yang mengaku dari keluarga tidak mampu.

Seperti diketahui, sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 17 Tahun 2017, setiap sekolah diwajibkan menyediakan kuota 20 persen untuk peserta didik dari kalangan tidak mampu. Bukti tidak mampu tersebut ditunjukkan dengan kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau SKTM dari kantor kelurahan.

Hal ini menimbulkan kekecewaan dari para orang tua calon peserta didik. Sebagian dari mereka mengeluhkan penggunaan SKTM dan KIP merugikan siswa yang memiliki NEM lebih tinggi akhirnya tergeser posisinya.

Salah satunya Krishna. Ia mendaftarkan anaknya ke SMAN 3 Semarang dan SMAN 1 Semarang secara murni menggunakan nilai NEM tanpa tambahan nilai. "Anak saya tidak ada piagam prestasi apa pun, murni nilai ujian saja. Saya juga bukan guru, saya yakin dengan kemampuan anak saya," katanya.

Krishna mengatakan, dirinya kecewa pada jurnal yang mulai pukul 15.00 kemarin ditutup, namun hasilnya baru akan diumumkan pada

Bertekad Ciptakan Sumber Daya Tanguh

18 Juni 2017

Kunci Kelezatan Nasi Lemak Pada Kaldu

18 Juni 2017

Warung Penang, Untuk Pecinta Masakan Melayu

18 Juni 2017

Komentar Terbaru

Yuli Yuli pada *Kredit Wibawa Minim Peminat, Tersedia Modal Rp 7 M, Baru 25 Peminjam*

Ficky Jihan Ababa pada *Jual Barang Bekas Agar Bisa Berangkat ke Vietnam*

Laras Kun Rahmanti Putri pada *Pemkab Semarang Dinilai Ceroboh*

James Destino Vito Nugroho pada *Sejak SD Sudah Suka Klakson Telolet*

James Destino Vito Nugroho pada *Sejak SD Sudah Suka Klakson Telolet*

potterscredit pada *Kredit Wibawa Minim Peminat, Tersedia Modal Rp 7 M, Baru 25 Peminjam*

19 Juni mendatang. "Lha ini kan lama banget, ditutup tanggal 14 Juni, pengumuman baru 19 Juni. Lha selama lima hari itu ada apa? Harusnya tetap dibuka dan bisa diakses, hingga orang tua bisa tetap memantau dan persiapan," keluhnya.

Tak hanya itu, ia menyayangkan adanya sejumlah oknum yang memanfaatkan SKTM atau KIP untuk mendapat tambahan poin. Hal itu jelas merugikan calon peserta didik yang NEM-nya tinggi, namun tergeser oleh calon peserta didik yang nilainya pas-pasan namun mendapat tambahan nilai dari SKTM atau KIP.

"Saya memang tidak tahu, tapi yang saya lihat, banyak orang tua kecewa dengan sistem ini. Anaknya NEM-nya bagus, memenuhi lah, tapi kemudian tergeser oleh siswa dengan logo plus (siswa miskin)," ujarnya.

Krishna meminta hal ini segera ditindaklanjuti oleh Pemprov Jateng selaku pelaksana PPDB *online*. Termasuk untuk lebih transparan dengan kembali dibukanya jurnal secara detail.

Hal senada diungkapkan Tenny, yang anaknya mendaftar di SMAN 15 Semarang dan SMAN 10 Semarang. Ia mengaku jengkel dengan sistem tersebut. Pasalnya, putranya harus tergeser oleh siswa yang menggunakan SKTM atau KIP. "Karena sudah tak ada harapan diterima, akhirnya berkas pendaftaran saya cabut, dan pindah ke SMAN 2 Mranggen yang dekat rumah. *Mantau* PPDB-nya juga mudah," ujar warga Sendangmulyo, Tembalang ini.

Aksi cabut berkas pendaftaran juga dilakukan Dwi Purwaningrum

Terminal Terboyo Dipindah ke Demak | Jawa Pos RADAR SEMARANG pada *Jadi Terminal Peti Kemas*

muhammad anas pada *Terminal Terboyo Dipindah ke Demak*

Kasihah, Zaenab Tak Punya Duit untuk Obati Kanker Kulit | Raisa.id pada *Kanker Kulit Menahun, Tak Miliki Biaya Berobat*

Umu Herwati pada *MAJT Favorit untuk Ngabuburit*

Berlangganan Update berita via Email

Masukkan alamat surel Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui surel.

Alamat Surat Elektronik

yang mendaftarkan putrinya di SMAN 1. Pasalnya, penambahan nilai piagam prestasi calon peserta didik lain membuat putrinya harus tergeser. "Kalau yang dipakai piagam prestasi akademik, bisa dimaklumi. Tapi ini piagam lomba *drumband*, *cheerleader*, *jambore*, dan nilainya pas-pasan, tapi justru lolos. Sementara yang nilai murninya bagus, malah tergeser," keluhnya.

Menurutnya, penggunaan piagam masih bisa dimaklumi jika kategori piagam itu terkait akademik. Ia mencontohkan, juara OSN atau FLS2N yang memang terkait sains dan kesenian dengan lembaga penyelenggara yang kredibel. "Lha kalau ini *kan* lucu, pakai piagam yang hanya untuk memanfaatkan penambahan nilai," katanya.

Hal senada diungkapkan Triyoga, salah satu orang tua calon peserta didik. Ia mengungkapkan, pelaksanaan PPDB *online* SMA/SMK negeri kali ini dirasa semrawut dengan adanya penambahan nilai yang merugikan peserta didik. Ia berharap pemerintah menindaklanjuti secara tegas terkait SKTM dan KIP. "Harus dicek langsung kebenarannya, jangan sampai oknum tertentu memanfaatkan kemudahan mendapatkan SKTM dan digunakan untuk anaknya mendaftar sekolah," tandasnya.

Triyoga menilai penggunaan SKTM atau KP dalam PPDB dinilai kurang pas. Sebab, mendaftar sekolah itu *kan* soal intelegensi anak bukan soal materi. Akan lebih pas kalau si anak sudah diterima, baru kemudian SKTM digunakan untuk keperluan penghitungan keringanan biaya dan sebagainya.

Sangat Mengecewakan

Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *online* untuk SMA/SMK negeri juga dikeluhkan para orang tua calon peserta didik di Salatiga. Mereka menilai penerapan regulasi baru dalam PPDB kali ini, ternyata justru *blunder*. Nilai unas yang mendekati sempurna, tidak bisa diterima di sekolah favorit karena adanya batasan kuota luar kota. Sementara nilai ujian nasional dengan akumulasi nilai kisaran 200 bisa diterima karena menggunakan SKTM. Hasilnya yang terlihat, sekolah favorit sekarang *input* siswa baru sangat rendah nilainya. Sangat berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya.

"Ini kacau aturannya. Banyak anak asal Kabupaten Semarang yang memiliki nilai bagus tidak bisa diterima lantaran batasan kuota. Misalnya, rumah di Suruh, harus sekolah di Ungaran, lokasinya lebih jauh dibandingkan ke Salatiga," keluh salah satu orang tua

pendaftar yang enggan disebutkan namanya.

Permasalahan lain datang dari panitia penerimaan. Peraturan petunjuk teknis pelaksanaan yang berubah-ubah sangat membingungkan panitia dan merugikan pendaftar pendaftar. Misalnya, penggunaan piagam prestasi, awalnya hanya yang digelar oleh dinas dan berjenjang yang bisa, belakangan dianulir dengan diperbolehkannya piagam yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah.

"Belum lagi mengenai SKTM yang awalnya banyak pendaftar mencari surat itu. Kemudian ada revisi mengenai sanksi pemberlakuan SKTM jika diketahui tidak sesuai dengan fakta," papar salah satu panitia penerimaan di SMAN 3 Salatiga yang juga enggan disebutkan namanya.

Wakil Kepala SMAN 1 Salatiga, Amri Wibowo, mengaku, saat ini memang masih adaptasi dengan peraturan baru PPDB. Namun, ia menyatakan harus ada evaluasi karena ada banyak hal yang masih perlu di benahi. "Perlu mengacu kepada Undang-Undang Pendidikan Nasional yang mewajibkan pendidikan 12 tahun. Lalu bagaimana dengan siswa yang harus dikeluarkan jika di belakang hari diketahui menggunakan SKTM atau piagam palsu?" ujar Amri setengah bertanya.

Lebih jauh ia menyadari jika tujuan awal peraturan ini adalah pemerataan pendidikan yang diidam-idamkan semua masyarakat. Namun untuk wilayah Salatiga memang perlu ada regulasi khusus, terkait dengan warga Kabupaten Semarang yang justru lebih dekat ke Salatiga dibandingkan ke wilayah lain di Kabupaten Semarang.

Pantauan koran ini, pendaftaran sekolah tahun ini relatif lebih bersih, karena tidak ada titipan atau rekomendasi dari pejabat. Namun dengan sistem yang baru, akhirnya muncul kesemrawutan oleh maraknya orang tua yang mendadak mengurus SKTM demi mendapatkan tambahan nilai bagi anak. Akhirnya, istilah sekolah favorit pun tumbang karena nilai yang sangat rendah bisa diterima dengan "dikontrol" SKTM. Sebaliknya, yang nilai tinggi justru gagal mendapatkan kursi di sekolah yang diidamkannya.

(amh/tsa/sas/aro/ce1)

Bagikan ini:



LABEL GANJAR PRANOWO Gubernur Jateng Pemalsuan PPDB SKTM
SMA/SMK Surat Keterangan Tidak Mampu

Berita sebelumnya

Dewan Tolak Sekolah Lima Hari

Berita berikutnya

Nyaman Berwirausaha

Tinggalkan Komentar:



Surel (wajib)

(Alamat takkan pernah dipublikasikan)

Nama (wajib)

Situs Web

Beri tahu saya komentar baru melalui email.

Beritahu saya pos-pos baru lewat surat elektronik.



